BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai-bagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.¹ Semakin berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang pada abad ini, mengakibatkan fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga didasar laut dan setiap usaha mengambil dan mengeruk kekayaan alam baik yang ada di permukaan laut maupun kekayaan yang ada di dasar laut dibawahnya.

Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan dengan penduduk pantai yang besar jumlahnya,² serta begitu luasnya wilayah pantai Indonesia menjadi alasan yang kuat bagi penduduk Indonesia sendiri secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut yang ada di setiap wilayah kepualauannya. Kekayaan berupa Sumber daya hayati yang terdapat di dalam laut tersebut sangat beragam mulai dari berbagai jenis ikan yang kaya protein, terumbu karang, aneka bahan tambang, dan masih banyak lagi.

¹ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm 1.

² *Ibid*

Nelayan adalah profesi mayoritas penduduk negeri ini. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di pedesaan dan pesisir pantai. Profesi ini sesuai dengan alam Indonesia yang memang agraris dan laut sebagai wilayah terbesar negeri ini.³ Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktifitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Untuk melakukan penangkapan ikan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun (ada periode waktu tertentu nelayan melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat.). Kondisi alam ini kerap kali disebut musim paceklik yaitu suatu musim dimana nelayan tidak beraktifitas sama sekali. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya mengutang pada juragan yakni pemilik kapal dan alat tangkap.⁴

Banyak tantangan yang dihadapi oleh Nelayan Tradisional, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh wilayah laut yang ada di dunia ini. Beberapa permasalahan nampak begitu kompleks, sebut saja larangan melintas dan aktivitas penangkapan ikan di perairan tertentu, sebagai masalah pertama. Di sini, pemerintah telah memetakan sejumlah titik yang boleh dan tidak boleh menjadi lokasi lintas perahu dan menangkap ikan. Persoalannya, secara teknis dan geografis, garis batas di laut tidaklah memiliki bentuk utuh, katakanlah kabur. Sehingga, dalam keadaan tertentu, nelayan kerap melintasi lokasi ‘terlarang’ dan melakukan aktivitas penangkapan.

³ <http://nelayan.perairanindonesia.com/>, diakses pada 01/11/2014

⁴ http://www.academia.edu/7472834/Ironis_Kehidupan_Nelayan_Miskin_ditengah_Potensi_Perikanan_Kelautan_yang_Melimpah, diakses pada 25/10/2014

Tak hanya itu, faktor di luar kendali personal turut mendorong nelayan untuk melintasi wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, ketika cuaca buruk, mereka memiliki pertimbangan khusus dalam mengemudikan perahu dan menyesuaikannya dengan arah angin maupun gerak ombak. Sayangnya, faktor-faktor tersebut sering tidak dipertimbangkan otoritas setempat. Nelayan yang melintasi jalur terancam diproses hukum – sekalipun upaya tersebut merupakan cara menyelamatkan diri yang paling efektif dari terjangan ombak.⁵

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan di bidang kelautan tersebut, masyarakat internasional telah mengupayakan serangkaian usaha untuk membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. Konferensi terakhir, yaitu Konferensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982 telah berhasil menghasilkan Konvensi tentang Hukum Laut Internasional/ *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Salah satunya poin penting dari *UNCLOS 1982* bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan.

Hukum laut internasional memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kedaulatan wilayah laut suatu negara pantai. Hal ini secara eksplisit terkandung dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya: *UNCLOS 1982*) pada Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara pantai diperpanjang melebihi wilayah

⁵ <http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2014/03/06/hak-nelayan-tradisional-di-kawasan-taman-nasional-bunaken/>, diakses pada 25/10/2014

daratnya dan perairan pedalaman dan, dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, hingga batas wilayah laut yang disebut laut territorial.⁶

Hukum laut internasional mengatur hal-hal signifikan terkait aplikasi kedaulatan negara di wilayah laut seperti kedaulatan di wilayah laut territorial dan hak-hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif. Setiap kegiatan lalu-lintas dan konservasi ekosistem laut dan samudera diatur dalam hukum laut internasional. Sehingga, kedaulatan negara terhadap wilayah perairannya diikuti oleh norma-norma yang mengandung hak dan kewajiban.

Salah satu hak yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara pantai di wilayah perairan adalah hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah laut. Hak ini meliputi wilayah laut territorial dan/atau perairan kepulauannya. Selain itu, dengan adanya konsep wilayah zona ekonomi eksklusif dan wilayah landas kontinen dalam wilayah perairan yang diatur dalam hukum laut internasional, memungkinkan suatu negara mengaplikasikan haknya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut.⁷

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6) *UNCLOS* 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan

⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

⁷ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/527/516>

kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati.⁸

Selanjutnya, Ketentuan Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982 mengatur lebih jauh lagi hak penangkapan ikan secara tradisional yang menjelaskan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan. Sedangkan syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral.⁹

Kepastian hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6) dan pasal 51 *UNCLOS* 1982 tidak secara bersamaan memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri. Hal tersebut terbukti belum adanya rumusan konsep terkait karakteristik tradisional dari hak ini secara lebih mendalam.

Ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kategori suatu nelayan memiliki hak penangkapan ikan. Pertama, nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu. Kedua, mereka telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional. Ketiga, hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu. Keempat nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan

⁸ Lihat Pasal 47 ayat (6) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

⁹ Lihat Pasal 51 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.¹⁰

Berbagai permasalahan tersebut tentunya harus disikapi dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Terlebih lagi, persen penduduk Indonesia tinggal dan sangat tergantung pada sumber daya laut dan perikanan nasional di lebih dari 8.000 desa pesisir. Selain itu, sebanyak 85% tenaga yang bergerak di sektor penangkapan ikan masih merupakan Nelayan Tradisional dan sangat jauh tertinggal dari nelayan Negara lain. Nelayan-nelayan tersebut berada di bawah garis kemiskinan dan jumlahnya semakin hari semakin menurun. Selama ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah manakala terjadi penangkapan kerap dinilai setengah hati.

Banyaknya kasus penangkapan nelayan tersebut kian mempertegas ketidak-pedulian Pemerintah atas keselamatan nelayan yang mencari penghidupan di wilayah perbatasan. Padahal melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan amanat cita-cita luhur berdirinya bangsa ini yang tertuang di dalam pembukaan konstitusi kita.

Oleh karena itu penting kiranya untuk membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan Hak Penangkapan Ikan secara Traditonal di dalam skripsi yang berjudul, “Karakteristik Hak

¹⁰ Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm.17

Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan *UNCLOS* 1982.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan *UNCLOS* 1982.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia menurut ketentuan *UNCLOS* 1982.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Laut di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan hak penangkapan ikan

secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) seluruh wilayah laut Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam hal penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) di seluruh wilayah laut Indonesia.

b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*)

Agar dapat dijadikan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional di seluruh wilayah Indonesia.

c. Akademisi

Agar dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional di seluruh wilayah Indonesia.

d. Masyarakat Umum dan Nelayan Tradisional

Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara yuridis tentang hak- hak serta kewajiban yang harus dilalukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak

terkait penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional yang ada di wilayah hukum Indonesia.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi penulis mengenai “*Traditional Fishing Rights*” yang berlaku di wilayah laut Indonesia berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan *UNCLOS* 1982” setelah diperiksa dan diteliti di perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan Judul yang sama maupun yang terkait sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti maupun ditulis. Jadi, penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul tersebut diatas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif, serta terbuka. Jika dikemudian hari ditemukan ada tulisan yang mirip dengan judul penulisan ini yang ditulis sebelum tulisan ini dibuat maka, penulisan ini akan berlaku sebagai tambahan ataupun pelengkap dari tulisan sebelumnya. Namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 1005102289 dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP *OVERFISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**”

Rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap *Overfishing* di Zoba Ekonomi Eksklusif Indonesia?”

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum berdsarakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap fenomena *Overfishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hasil penelitiannya dalah kondisi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedang mengalami *Overfishing*, seperti diwilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka. Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) semakin berkurang populasinya. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya ilegal, *Unreported and Unregulated Fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu semua kebijakan, baik dari tingkat local, nasional, sub-regioanal, regional dan global disusun berdsarakan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia

2. Penulisan hukum oleh Emanuel Dewanto Bagus di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 056410/930051051201120350 dengan judul “ **KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**”.

Rumusan masalahnya sebagai berikut “ Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Akibat Tindakan Pencemaran yang Dilakukan oleh Kapal Asing?”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Hal ini terbukti pada tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

3. Penulisan hukum oleh Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510367 dengan judul **“UPAYA NEGARA INDONESIA DALAM**

MENANGANI MASALAH *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA”.

Rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?”

Tujuan penelitiannya adalah Mengetahui upaya Negara Indonesia dalam menangani masalah *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hasil penelitiannya adalah upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu diranah internasional, Indonesia turut aktif dalam hal pemberantasan *IUU Fishing*. Salah satunya yaitu dengan ikut dalam kerjasama internasional *Regional Fisheris Management Organization* (RFMO). Sementara diranah nasional, Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal, *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi diwilayah perairan Indonesia, pemerinta Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat Negara-negara tetangga tidak menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam ini selalu terjadi diwilayah perairan Indonesia. Usaha yang dilakukan Indonesia untuk menangani masalah *illegal fishing* kurang

serius. Indonesia lebih mengedepankan isu-isu seperti korupsi di birokrasi dibanding isu-isu mengenai *illegal fishing*.

F. BATASAN KONSEP

1. Karakteristik

Pengertian Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri khusus, ciri khulki – Bangsa Indonesia.¹¹

2. Hak (menurut kamus hukum)

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui

¹¹ <http://kbbi.web.id/eksistensi>. Diakses pada 10/10/2014

ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.¹²

3. *Traditional Fishing Rights*

Pengertian *Traditional Fishing Rights* menurut Ketentuan pasal 51 *UNCLOS* 1982 adalah sebagai berikut, Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan Tradisional Negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.¹³

4. Nelayan

Pengertian Nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengacu kepada norma hukum positif berupa konvensi-konvensi hukum internasional serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penelitian hukum ini

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada 10/10/2014

¹³ Pasal 51 ayat (1) *UNCLOS* 1982

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data skunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa konvensi-konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, wawancara dengan ahli/narasumber, hasil penelitian, jurnal, majalah, data skunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan konvensi-konvensi hukum laut mengenai Karakteristik “*Traditional Fishing Rights*” di Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber sebagai ahli di bidang hukum kelautan dan perikanan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum / skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

¹⁴ Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197

BAB II: PEMBAHASAN

1. Pada Sub Bab pertama ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Nelayan di Indonesia terdiri dari Sejarah Nelayan di Indonesia, serta Perkembangan Nelayan di Indonesia sejak Kerajaan-Kerajaan jaman dahulu.
2. Pada Sub Bab kedua akan membahas mengenai Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) yang terdiri dari pengertian Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional dan Pengaturan Hukum Hak terkait Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional serta Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional.
3. Pada Sub Bab ketiga akan membahas mengenai Perlindungan Hukum terkait Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional Nelayan Tradisional di Indonesia.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan peneliti/penulis memeberikan saran.